

EFEKTIVITAS PROGRAM SMART AUDITING DI KANTOR INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR

Nur Irma^{1*}, Muhlis Madani², Nasrul Haq³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out the effectiveness of the smart auditing program at the Makassar City Inspectorate Office. This study used descriptive qualitative, namely an objective description of the state of a program. Thi study used a case study with a total of 6 informants. The results of the study indicated that the Smart Auditing program at the Makassar City Inspectorate Office had run effectively seen from several effectiveness measurement indicators, namely: 1) Program understanding, indicating that the Inspectorate had carried out socialization and provided technical guidance on a regular basis so that the auditors could know the intent and the purpose of launching Smart Auditing. 2) Right on target, it had been effective because with Smart Auditing, auditors couldn carry out audit activities more quickly and thoroughly. 3) On time, in terms of using time more effectively because the completion of the examination could be faster. 4) The achievement of the objectives had not been fully effective because there were still some obstacles that were felt by the auditors. 5) Real changes, the impact of the existence of Smart Auditing was felt by auditors where previously audits that were carried out manually and required energy and time could be completed without having to be in the object of examination (SKPD).

Keywords: effectiveness, smart auditing program

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program smart auditing di kantor inspektorat kota Makassar. Metode peneltian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu gambaran secara objektif terkait keadaan suatu program, dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan jumlah informan sebanyak 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Smart Auditing di Kantor Inspektorat Kota Makassar sudah bisa dikatakan berjalan dengan efektif dilihat dari beberapa indikator pengukuran efektivitas yaitu: 1) Pemahaman program, menunjukkan bahwa pihak Inspektorat telah melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara berkala agar para auditor bisa mengetahui maksud dan tujuan diluncurkannya Smart Auditing. 2) Tepat sasaran, dapat dikatakan efektif karena dengan Smart Auditing auditor dapat melakukan kegiatan pemeriksaan lebihcepat dan menyeluruh. 3) Tepat waktu, dalam hal penggunaan waktu lebih efektif karena penyelesaian pemeriksaan bisa lebih cepat. 4) Tercapainya tujuan, belum sepenuhnya efektif karena masih ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh para auditor . 5) Perubahan nyata, dampak dari adanya *Smart Auditing* sangat dirasakan oleh para auditor dimana sebelumnya pemeriksaan yang dilakukan secara manual dan membutuhkan tenaga dan waktu dapat diselesaikan tanpa harus berada di objek pemeriksaan (SKPD).

Kata kunci: efektivitas, program smart auditing

* nurirma@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, seorang kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari beberapa unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat dan unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan. Unsur yang mendukung tugas kepala daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Salah satu bagian yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD dan kegiatan non keuangan pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan,

pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Menurut Boynton (2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji serta mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan juga bisa memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam rangka menentukan tingkat efektivitas keberhasilan sebuah kelompok atau organisasi maka harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan yang terjadi, tentu juga akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan yang dibebankan. Namun demikian bukan berarti bahwa efektivitas hanya bersumber dari kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan, tetapi juga harus dipadukan dengan aktivitas berpikir secara rasional, kemudian di implementasikan ke dalam suatu tindakan yang lebih tepat, sehingga tujuan yang hendak di capai dapat memberikan hasil yang memuaskan kepada semua pihak baik sebagai

anggota individu, kelompok maupun organisasi.

Di Indonesia perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan banyak keuntungan pada berbagai bidang seperti bidang perekonomian, pemerintahan, pendidikan dan bidang lainnya. Adanya pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Seiring dengan perkembangan tersebut semua organisasi atau perusahaan membutuhkan informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.

Tantangan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang saat ini dihadapi oleh Inspektorat Kota Makassar sangat kompleks. Model dan cara pemeriksaan pengelolaan kegiatan serta pertanggungjawaban administrasi keuangan pada SKPD yang selama ini dilakukan Inspektorat Daerah Kota Makassar dengan cara pemeriksaan komprehensif setiap bulannya membutuhkan strategi baru yang lebih efektif dan efisien karena kompleksitas

permasalahan yang dihadapi. (inspektorat.makassarkota.go.id)

Upaya pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut ialah dengan mengembangkan Model Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kegiatan dan Keuangan Berbasis elektronik (*E-Auditing* atau *Smart Auditing*). Model ini memadukan proses e-budgeting dan e-auditing, sehingga bisa lebih memudahkan auditor Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam melihat progress Pertanggung Jawaban Keuangan dan Kegiatan seluruh SKPD secara *on line*, dimana selama ini dilakukan secara manual. Smart Auditing menyediakan data pertanggung jawaban keuangan yang bermanfaat dalam menunjang kelancaran pengawasan dan pengendalian program atau kegiatan SKPD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Siagian dalam Indrawijaya (2010:175) memberikan pengertian tentang efektivitas yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini suatu pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak dilihat bagaimana melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hasibuan (2008:75), melihat efektivitas dari prestasi kerja bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang didasarkan atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Lebih jelas bahwa kecakapan, usaha dan kesempatan dapat memberikan hasil kerja yang disebut dengan efektif. Hasibuan menyatakan bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran yang eksplisit dan implisit.

Menurut Robbins dalam Indrawijaya (2010:175), bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan mencerminkan kontribusi strategis, minas mengevaluasi dan tingkat kehidupan organisasi. Lebih lanjut menurut Saxena dalam Indrawijaya (2010:175), mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah tercapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya orientasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi pada pencapaian efektivitas.

Kemudian menurut Sedarmayanti (2006), efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan maupun kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.

Menurut Gie dalam Budiani (2007) menyebutkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki. Maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai

maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya.

Dari beberapa deskripsi tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengarah kepada pencapaian tujuan, yakni pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa jenis pendekatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli untuk membahas efektivitas suatu organisasi atau program. Pendekatan-pendekatan penting dikemukakan sebagai dasar pengukuran efektivitas. Secara eksplisit, Robbin yang dikutip Indrawijaya (2010:177), mengemukakan empat pendekatan dalam memandangkan efektivitas suatu organisasi yaitu sebagai berikut: 1) Pendekatan pencapaian tujuan (*goals attainment approach*). Pendekatan yang mengandung bahwa keefektifan suatu organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (*ends*), keseimbangan caranya (*means*). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pencapaian tujuannya yang berhasil menjadi sebuah tujuan yang tepat tentang efektivitas. 2) Pendekatan sistem (*system approach*). Pendekatan

sistem yang mengasumsikan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan dari organisasi. 3) Pendekatan konstituensi-strategi (*strategic-constituencies approach*). Pendekatan ini memandang pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu dalam lingkungan yang dari orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. 4) Pendekatan nilai-nilai yang bersaing (*competing value approach*). Pendekatan ini adalah gabungan dari ketiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup dimana organisasi itu berada.

Dalam mengukur efektivitas suatu program maupun kegiatan harus memperhatikan beberapa indikator menurut Sutrisno (2007), yaitu: 1) Pemahaman program, 2) Ketepatan sasaran, 3) Tepat waktu, 4) Tercapainya tujuan, 5) Perubahan nyata.

Pendapat lain, Sugiono dalam Budiani (2007), menyebutkan beberapa indikator untuk mengukur efektivitas ada;ah sebagai berikut: 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya, 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya, 3) Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya, 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sutarto dalam Tangkilisan (2002) mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal adalah Faktor Internal meliputi sebagai keseluruhan faktor yang ada dan berkaitan dengan sekelompok orang yang melakukan aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Tangkilisan (2005) adanya kerjasama yang merupakan unsur terpenting dalam

suatu lembaga. Hubungan kerjasama yang baik maka keberhasilan pencapaian tujuannya akan lebih cepat. Kerjasama ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu melainkan dapat juga dengan individu dengan instansi atau instansi dan instansi, sedangkan Faktor Eksternal mencakup suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah lembaga dan melibatkan diri dengan maksud untuk mendapatkan dukungan, mengatasi hambatan, melakukan sumber daya, menata lingkungan yang kondusif dan proses transformasi nilai maupun inovasi maupun norma sosial yang ada.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Manila dalam Jones (1996) berpendapat bahwa program akan menunjang implementasi, program tersebut memuat berbagai aspek antara lain: 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai, 2) Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan, 3) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dalam prosedur yang harus dilalui, 4) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan, 5) Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian program yang telah diuraikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan mulai tanggal 16 November 2020 sampai tanggal 14 Januari 2021. Penelitian ini berlokasi di Kantor Inspektorat Kota Makassar Jalan Teduh Bersinar No.07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar 90224. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengukur efektivitas program dan lokasi inilah program *Smart Auditing* diterapkan.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan objek berdasarkan fakta dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang objektif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang memberikan gambaran berdasarkan fenomena kenyataan yang terjadi mengenai Efektivitas Program *Smart Auditing* di Kantor Inspektorat Kota Makassar.

Adapun sumber data yang digunakan terbagi dua yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yaitu pertama peneliti melakukan pengamatan seperti apa kondisi lapangan dan penerapan program *Smart Auditing*, serta bagaimana pelaksanaan menurut para informan yang terkait di lokasi penelitian. Adapun Wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung melalui daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumen yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, dokumentasi yang akan diambil yaitu berbentuk rekaman atau foto.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengabsahan

data dengan menggunakan hasil triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keefektifan dalam menjalankan suatu aktivitas senantiasa harus di lengkapi dengan rambu-rambu untuk dipenuhi sepenuhnya dan apabila dikemas dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan hasil yang semaksimal mungkin dan bisa menciptakan kekuatan organisasi yang baik yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang berkaitan dengan swasta.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terlihat dari semakin meningkatnya secara signifikan besaran APBD Kota Makassar dan bertambahnya program dan kegiatan pada seluruh SKPD setiap tahunnya.

Di Indonesia perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan banyak keuntungan pada berbagai bidang seperti bidang perekonomian, pemerintahan, pendidikan dan bidang lainnya. Adanya pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih

ekonomis, efisien, dan efektif. Seiring dengan perkembangan tersebut semua organisasi atau perusahaan membutuhkan informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal.

Upaya pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut ialah dengan mengembangkan Model Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kegiatan dan Keuangan Berbasis elektronik (*E-Auditing* atau *Smart Auditing*). Pengembangan Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) sejalan dengan Konsep *Sombere dan Smart City* Pemerintah Kota Makassar yang mengharuskan seluruh SKPD agar menerapkan teknologi informasi untuk mengefisienkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kegiatan sebagai upaya untuk mencegah berbagai penyimpangan (*fraud*) yang mungkin dapat terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan SKPD. Aplikasi Smart Auditing akan menyediakan *big data* pertanggungjawaban keuangan yang sangat bermanfaat dalam menunjang kelancaran kegiatan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan Inspektorat

Kota Makassar. Untuk mengukur efektivitas program Smart Auditing tersebut peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno yang terdiri dari pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Pemahaman Program

Pemahaman program menurut Sutrisno (2007) yaitu dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program, maksudnya melihat bagaimana cara untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang *Smart Auditing* kepada auditor, apakah para auditor dapat memahami maksud dan tujuan serta sistem kerja *Smart Auditing* tersebut. Manila dalam Jones (1996) berpendapat bahwa program akan menunjang implementasi, program tersebut memuat berbagai aspek salah satunya ialah adanya strategi dalam pelaksanaan, dalam hal ini strategi yang dibutuhkan ialah peranan pihak Inspektorat untuk memberikan sosialisasi/bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala oleh para auditor.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menilai bahwa pihak inspektorat telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para auditor dengan tujuan agar para auditor mengetahui maksud dan tujuan diluncurkannya *Smart Auditing* tersebut dan apabila ada hal yang kurang dipahami oleh auditor, bisa disampaikan kepada pihak yang membuat aplikasi tersebut hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sugiono dalam Budiani (2007) mengatakan bahwa sosialisasi program memampukan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Sosialisasi mengenai *Smart Auditing* secara berkala agar dapat memudahkan para auditor untuk memahami segala sistem kerja yang terdapat dalam *Smart Auditing* karena tidak semua auditor mampu mengoperasikan teknologi modern seperti komputer dengan baik, sehingga pemahaman mengenai IT sangat berpengaruh untuk mengoperasikan *Smart Auditing* maka dari itu diadakan sosialisasi untuk membimbing para auditor.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menilai bahwa program *Smart Auditing* disambut dengan baik dan para auditor juga telah memahami sistem kerja pada *Smart Auditing* tersebut. Pihak Inspektorat juga telah melakukan kerjasama dengan bagian keuangan di Balaikota sehingga dapat terkoneksi langsung untuk melihat data pertanggung jawaban dan penganggaran keuangan oleh SKPD sehingga para auditor bisa lebih mudah untuk melakukan tanggung jawab sesuai dengan dan fungsi mereka masing-masing dalam mengoperasikan *Smart Auditing* kapan saja dan dimana saja dengan melalui jaringan internet.

Tepat Sasaran

Tepat sasaran merupakan indikator yang penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program, dalam pelaksanaan program *Smart Auditing* yang ingin dilihat adalah ketepatan sasaran yang ingin dicapai apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau tidak, sejalan dengan teori yang dikeluarkan oleh Sutrisno (2007) bahwa tepat sasaran dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan. Dalam program *Smart Auditing* sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan

akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Penentuan sasaran yang tepat dari suatu individu atau organisasi akan sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi, begitu juga sebaliknya jika sasaran yang ditentukan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan itu sendiri (Makmur, 2011). Sasaran diluncurkannya *Smart Auditing* ini adalah auditor itu sendiri dengan adanya *Smart Auditing* ini para auditor dapat melakukan kegiatan pemeriksaan lebih cepat dan menyeluruh meskipun jumlah auditor terbatas. Akses terhadap dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dilakukan dengan sistem online sehingga dapat dilakukan deteksi dini potensi penyimpangan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menilai bahwa SKPD lebih tertib dan tepat waktu dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD. Ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu

sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi, *Smart Auditing* juga sangat membantu kinerja para auditor di masa pandemi seperti ini karena untuk melakukan pemeriksaan tidak perlu melakukan tatap muka dan jika memang harus ke SKPD yang terkait itu dikarenakan ada hal yang benar-benar urgent karena kondisi pandemi yang berjalan seperti ini memengaruhi mobilitas auditor dalam bekerja.

Tepat Waktu

Tepat waktu menurut Sutrisno (2007) dilihat dari sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan pelayanan/pekerjaan. Tepat waktu dalam suatu program yaitu sesuai dengan jadwal atau target yang telah ditentukan sebelumnya, dengan penggunaan waktu yang tepat maka program dapat dikatakan efektif. Dalam suatu program, ketepatan waktu sangat diperlukan untuk mencapai efektivitas, oleh karena itu pendekatan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi sangat berpengaruh dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan

pemerintah daerah sehingga mampu menciptakan efektivitas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, apakah program program smart auditing berhasil atau tidak.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa dengan adanya *Smart Auditing* waktu yang dibutuhkan untuk mengakses dokumen SPJ jauh lebih cepat dan mudah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Makmur (2011) yang menyatakan waktu merupakan dasar dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi tetapi juga dapat memberikan dampak berupa kegagalan terhadap suatu aktivitas organisasi. Namun meskipun dalam hal pemeriksaan bisa dilakukan dengan cepat tetap saja masih ada kendala yang harus dihadapi oleh auditor terkait dengan keterlambatan SKPD yang lain dalam mengunggah dokumen mereka sehingga waktu yang dibutuhkan oleh para auditor untuk menyelesaikan tugas tepat pada waktunya cukup terhambat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ini juga menilai bahwa dengan adanya *Smart Auditing* cukup

membantu para auditor mulai dari efektivitas waktu kemudian sasaran yang akan dicapai bisa diketahui lebih dahulu. Jadi penggunaan waktu tentunya lebih efektif walaupun dengan jumlah auditor yang terbatas. Apapun yang menggunakan waktu secara tepat akan mampu menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian dalam Indrawijaya (2010) memberikan pengertian tentang efektivitas yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini suatu pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak dilihat bagaimana melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Tercapaiannya Tujuan

Tercapainya tujuan dilihat dari berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah diharapkan atau direncanakan sebelumnya, menurut Sutrisno (2007) mengatakan bahwa tercapainya tujuan juga diukur dengan melalui pencapaian tujuan program yang telah dijalankan, dan dalam suatu program tentu sangat mengharapkan dapat mencapai tujuan sehingga dibutuhkan perananan dari pihak Inspektorat dan pihak luar dalam

mendukung pelaksanaan program *Smart Auditing*.

Tujuan dari program *Smart Auditing* yaitu untuk mewujudkan pola pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan SKPD secara elektronik dan online yang lebih cepat dan mudah, sehingga dapat mengatasi kekurangan jumlah auditor dan dapat melakukan deteksi dini atas potensi penyimpangan yang dapat terjadi pada SKPD dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menyelesaikan proses pertanggungjawaban kegiatan dan keuangannya tepat, teratur dan terdokumentasi dengan baik.

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang tepat akan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan terutama yang berorientasi dalam jangka panjang (Makmur, 2011).

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa menunjuk tujuan dari program *Smart Auditing* adalah kecepatan dalam hal penyelesaian pemeriksaan. Namun untuk mencapai sebuah tujuan tentunya selalu ada hambatan-hambatan dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut. *Smart Auditing* masih sampai saat ini

masih dalam tahap proses pemantauan, dan SKPD pun masih membutuhkan pendampingan dalam pengimputan data, SKPD juga harus disiplin dalam mengunggah data dalam hal ini pengaruh kepemimpinan (*leader*) sangat penting agar kegiatan yang saling terkait dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya artinya dibutuhkan juga dorongan dari pihak Inspektorat agar SKPD tersebut untuk bisa mengunggah dokumen-dokumen mereka. Selain itu hal penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai sebuah tujuan salah satunya dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan secara keseluruhan.

Sutarto dalam tagkilisan (2002) berpendapat bahwa untuk mencapai sebuah efektifitas ada beberapa faktor yang mempengaruhi yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mencakup suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah lembaga dan melibatkan diri dengan maksud untuk mendapatkan dukungan, mengatasi hambatan dan melakukan sumber daya.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa adanya *Smart Auditing* sangat didukung oleh Pemerintah Kota Makassar baik

dukungan dalam bentuk kebijakan maupun kebutuhan dana dalam pelaksanaannya. Bentuk dukungannya dengan penyediaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa (komputer/laptop, scanner, jaringan internet). Sedangkan faktor internal meliputi keseluruhan faktor yang ada, hubungan kerjasama yang baik maka keberhasilan pencapaian tujuan akan lebih cepat. Kerjasama ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu melainkan dapat jugadengan individu dengan instansi atau instansi dengan instansi (Tangkilisan,2005). Dukungan dan komitmen yang kuat yang kuat dari seluruh kepala SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan dari *Smart Auditing*.

Perubahan Nyata

Perubahan nyata dalam menurut Sutrisno (2007) dalam teorinya yaitu diukur dengan melalui sejauh mana program tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat dalam hal ini perubahan nyata adalah adanya perubahan keadaan yang terjadi sebelum dan setelah adanya program *Smart Auditing*. Perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat bahwa sejauh

mana program *Smart Auditing* dapat memberikan efek atau dampak serta perubahan bagi pihak Inspektorat terkhususnya para auditor dalam menjalankan tugasnya, apakah dapat merasakan adanya perubahan atau dampak dengan adanya program *Smart Auditing* tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa program *Smart Auditing* mampu memberikan perubahan terutama pada saat akan melakukan pemeriksaan dimana sebelum adanya *Smart Auditing* banyak tumpukan dokumen akan membutuhkan lagi biaya untuk penggandaan, tetapi dengan adanya *Smart Auditing* hal seperti itu bisa mengefisienkan biaya penganggaran, dengan demikian beban APBD khususnya dari belanja penggandaan bisa di hemat lagi atau digunakan ke belanja yang lainnya. Selain itu *Smart Auditing* juga bisa lebih memudahkan auditor untuk melakan pemeriksapan saja dan dimana saja, juga bisa mempercepat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor sehingga bisa lebih menghemat waktu dan laporan yang dikerjakan bisa selesai tepat pada waktunya.

Perubahan yang dirasakan oleh para auditor adalah *Smart Auditing* juga mempermudah dalam melakukan

pemeriksaan terutama pada saat melakukan *survey* pendahuluan untuk mencari titik kritis dimana bisa dilihat permasalahan-permasalahan apa yang harus di periksa Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *Smart Auditing* memberikan kemudahan pada tim pemeriksa baik internal maupun eksternal untuk mengakses database dokumen pertanggungjawaban keuangan dan kegiatancepat dan mudah sehingga dapt mendeteksi dini potensi penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa *Smart Auditing* mampu memberikan perubahan yang nyata terhadap kinerja auditor sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2006) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan maupun kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga, seperti halnya dengan kegiatan pemeriksaan dulu dilakukan oleh inspektorat secara manual yang membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak kini bisa dilakukan secara *online* dan *real time* tanpa harus berada di objek pemeriksaan (SKPD). Hal ini dapat dilakukan karena dokumen

pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan sudah di input oleh masing-masing SKPD kedalam sistem sehingga database terpusat secara elektronik. Walaupun dengan kondisi jumlah auditor yang terbatas tetap dapat dilakukan pemeriksaan dengan lebih cepat.

KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian analisis yang telah peneliti lakukan di kantor inspektorat kota Makassar maka diperoleh kesimpulan sebagai yaitu: 1) Pemahaman Program, menunjukkan bahwa bahwa pihak Inspektorat telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para auditor dengan tujuan agar para auditor mengetahui maksud dan tujuan diluncurkannya *Smart Auditing* tersebut. Sosialisasi mengenai *Smart Auditing* pun berjalan dengan lancar yang dilakukan secara berkala agar dapat memudahkan para auditor untuk memahami segala sistem kerja yang terdapat dalam *Smart Auditing*, sehingga pemahaman program ini sudah bisa di katakan efektif, 2) Tepat Sasaran, dapat dikatakan efektif karena dengan adanya *Smart Auditing* ini para auditor dapat melakukan kegiatan pemeriksaan lebih cepat dan menyeluruh meskipun jumlah auditor

terbatas, 3) Tepat Waktu, dalam hal penggunaan waktu sudah bisa dikatakan efektif karena penyelesaian pemeriksaan bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang manual karena pemeriksaan dilakukan secara *online* sehingga para auditor bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya meskipun dengan jumlah auditor yang terbatas, 4) Tercapainya Tujuan, menunjukkan belum bisa dikatakan efektif karena masih banyaknya hambatan-hambatan yang dirasakan oleh auditor seperti lambatnya para SKPD mengunggah dokumen yang akan di periksa serta sarana dan prasarana yang belum di dapatkan secara keseluruhan oleh SKPD, 5) Perubahan Nyata, sudah bisa dikatakan efektif karena para auditor sangat merasakan perubahan sebelum dan setelah *Smart Auditing* ini diluncurkan, dimana kegiatan pemeriksaan yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat secara manual yang membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak kini bisa dilakukan secara *online* tanpa harus berada di objek pemeriksaan (SKPD).

DAFTAR PUSTAKA

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna (EkaTaruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar

- Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Volume 2(1)
- Hasibuan & Malaya, S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indrawijaya, A.I. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Inspektorat Kota Makassar.(31 Mei 2018). *Launching Smart Auditing*. Diperoleh dari <https://www.inspektorat.makassar.kota.go.id/detailpost/launching-smartauditing>
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007.
- Sedarmayanti, (2006). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sutrisno, E. (2007). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Kencana
- Tangkilisan. (2002). *Manajemen SDM Birokrasi Publik; Strategi keunggulan pelayanan publik*. Jogjakarta: YPAPI.